

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu tentang “Implementasi Kebijakan Uji Kendaraan Bermotor Gratis di Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro”, yang dianalisis berdasarkan empat faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III yang dikutip dari (Kadji, 2015), maka dapat disimpulkan sebagaimana berikut.

##### **1. Komunikasi**

Faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan uji kendaraan bermotor gratis di Kabupaten Bojonegoro berlangsung cukup berhasil, terutama dalam lingkup internal UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bojonegoro. Akan tetapi komunikasi eksternal kepada masyarakat masih menghadapi kendala.

##### **2. Sumber daya**

Faktor sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan telah berjalan dengan cukup berhasil. Sumber daya manusia sudah memadai. Selain itu, dari sisi regulasi pelaksanaan kebijakan ini memiliki landasan hukum yang kuat dan yang berwenang dalam pelaksanaan teknis ialah UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bojonegoro. Akan tetapi, masih terdapat kendala teknis yang perlu mendapat perhatian.

### 3. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Faktor disposisi atau sikap pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan ini sudah berhasil. Dimana telah didukung oleh motivasi memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, sikap profesional serta sikap positif dari para pelaksana ketika memberikan pelayanan.

### 4. Struktur Birokrasi

Faktor struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan ini sudah berhasil. Hal ini tercermin dari adanya Standar Operasional Prosedur atau SOP yang jelas dan dijadikan pedoman pelaksanaan. Susunan pelaksana pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bojonegoro juga tersusun secara sistematis sesuai dengan tugas, fungsi dan tujuan organisasi.

Implementasi kebijakan pada pelaksanaan Uji Kendaraan Bermotor Gratis di Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro berdasarkan faktor komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi dapat dikatakan belum berhasil. Hal ini dikarenakan belum terwujud meningkatnya partisipasi masyarakat. Selain itu, terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki sebagaimana berikut :

1. Faktor Komunikasi yakni tidak adanya sosialisasi mengenai kebijakan uji kendaraan bermotor gratis secara tatap muka kepada masyarakat.
2. Faktor Komunikasi yakni keterbatasan anggaran sehingga tidak melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat.
3. Faktor Sumberdaya yakni kondisi alat uji kendaraan yang sudah tua dan gangguan pada jaringan serta listrik dapat menghambat proses input data.

Upaya perbaikan dan peningkatan mutu pada aspek-aspek yang masih lemah tetap diperlukan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih maksimal, efisien, dan berkelanjutan di masa mendatang.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Faktor Komunikasi maka Dinas Perhubungan diharapkan melakukan penambahan anggaran untuk sosialisasi secara tatap muka, seperti melalui kegiatan penyuluhan di desa-desa, forum warga, atau kerja sama dengan kecamatan dan kelurahan. Selain itu, pemasangan spanduk atau baliho di tempat strategis dapat memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat.
2. Faktor Sumberdaya maka Dinas Perhubungan diharapkan mengusulkan penambahan anggaran guna mengganti atau memperbaharui peralatan uji kendaraan yang sudah usang dan berusia lebih dari 20 tahun. Peremajaan alat sangat penting agar proses pengujian tetap akurat, cepat, dan sesuai standar keselamatan.